

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TRANSAKSI PIHAK BERELASI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019

Karisma Nurjayanti¹⁾, Ignasius Novie Endi Nugroho²⁾

^{1), 2)}Fakultas Ekonomi, Universitas Surakarta

E-mail: karismanurjayanti399@gmail.com¹⁾, novie.endinugroho@gmail.com²⁾

Abstract

This research is an in-depth study of the factors that affect related party transactions in manufacturing companies. Relatively few studies in Indonesia on the influence of ownership structures, independent commissioners, and audit committees of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange have been found. Therefore, this is an interesting thing to be used as a research. This study aims to determine the influence of the ownership structure of controlling shareholders, independent commissioners, and audit committees on transactions of related parties of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange annual financial statements for the period 2017-2019 partially or simultaneously. This research is a type of quantitative research. The sample used was 84 family companies listed on the Indonesia Stock Exchange, except banking companies in the financial sector for the period 2017 to 2019. The sampling technique in this study is to use the purposive sampling method. The source of data in this study is research data from the Indonesia Stock Exchange. This study has results, namely partially the ownership structure has a positive and significant influence on related party transactions, while independent commissioners, and the company's audit committee have no influence. Meanwhile, simultaneously, the ownership structure of the controlling shareholder, independent commissioner, and audit committee influences the transactions of related parties of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange.

Keywords: *ownership structure, independent commissioner, company audit committee, related party transactions*

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian secara global, kegiatan ekonomi tanpa batas dilakukan dalam suatu perusahaan. Salah satu tantangan besar sistem tatakelola perusahaan di Asia saat ini adalah membatasi transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali yang merugikan pemegang saham non pengendali (Nugroho, 2020).

Menurut Nugroho (2020) Transaksi berelasi merupakan transaksi yang lazim dilakukan antar pihak dalam suatu perusahaan. Tetapi tidak semua perusahaan dapat melakukan transaksi berelasi, hanya perusahaan grup yang dapat melakukan transaksi

pihak berelasi. Transaksi berelasi dapat menguntungkan perusahaan dalam mengurangi biaya transaksi dengan cara memberikan akses istimewa dan efisiensi (Habib *et al.*, 2017). Selain dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, kemungkinan besar transaksi pihak berelasi dapat menyebabkan masalah dan rentan dengan masalah agensi (Supatmi *et al.*, 2019). Timbulnya suatu peluang kecurangan yang dapat merugikan bagi pemegang saham minoritas dan menguntungkan bagi pemegang saham pengendali dalam beberapa kondisi dapat disebabkan karena adanya suatu transaksi pihak berelasi didalam perusahaan (Jian & Wong, 2013).

Bagi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham pengendali transaksi pihak berelasi cenderung yang menjadi sarana ekspropriasi (Tambunan *et al.*, 2017). Cheung *et al.*, (2009) menyatakan transaksi berelasi berupa asset, seperti akuisisi asset, penjualan asset, swap asset, dan perdagangan barang atau jasa, dan pengeluaran kas, merupakan transaksi berelasi tunneling. Tunneling merupakan tindakan pengalihan sumber daya perusahaan yang dilakukan pemegang saham pengendali yang menguntungkan mereka serta dapat merugikan kepentingan pemegang saham lainnya (Nugroho, 2020).

Untuk menghindari permasalahan yang terjadi, dalam laporan keuangan dicantumkan mengenai pengungkapan pihak berelasi yang telah ditetapkan pemerintah dalam PSAK 7. Menurut PSAK No.7 transaksi pihak berelasi (RPT) mengacu pada transfer sumberdaya, jasa, atau kewajiban antara pihak berelasi, terlepas dari apakah suatu harga dibebankan. Menurut Tambunan *et al.*, (2016) perusahaan yang dikendalikan dengan afiliasi perusahaan atau afiliasi anggota dewan, anggota direksi, dan pemegang saham utama perusahaan atau perusahaan yang dibawah kendali yang sama biasanya melakukan transaksi pihak berelasi. Oleh karena itu, struktur kepemilikan, komisaris independen, dan komite audit diduga berpengaruh terhadap transaksi pihak berelasi.

Struktur kepemilikan merupakan presentase saham yang dimiliki oleh seseorang dalam perusahaan (Edison, 2017). Pemegang saham disebut sebagai pemilik perusahaan atas penyertaan modalnya, mereka berperan penting atas usaha yang berjalan didalam perusahaan, terlebih apabila manajemen perusahaan ikut diambil alih oleh pemegang saham. Keputusan manajemen dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi berkaitan dengan struktur kepemilikan dalam transaksi pihak berelasi (Wahyudin & Fajriah, 2017). Struktur kepemilikan terkonsentrasi akan lebih banyak mendorong perusahaan untuk melakukan transaksi pihak berelasi (Utama & Utama, 2013).

Menurut penelitian dari Krisvalenta Wukirasig (2022), berdasarkan laporan keuangan tahunan dalam industri manufaktur BEI tahun 2018-2020, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan mempengaruhi transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam suatu perusahaan, struktur kepemilikan dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori seperti asing, domestic, keluarga, manajemen dan blockholder (terbesar).

Berdasarkan survey PwC (2014) lebih dari 95% perusahaan di Indonesia adalah perusahaan milik keluarga. Perusahaan keluarga adalah salah satu entitas penting dan berpengaruh, terutama dalam bidang ekonomi. Perusahaan keluarga adalah perusahaan dengan pemegang saham pengendali terbesarnya yaitu individu atau anggota keluarga tersebut (La Porta *et al.*, 1999). Satu sifat nyata dari perusahaan keluarga adalah berkeinginan untuk mempertahankan suatu bisnis dengan jangka waktu yang panjang dan dapat mewariskan bisnis kepada keturunan (Cerdan & Hernandez, 2013; Miralles-Macelo *et al.*, 2014). Untuk memisahkan perusahaan keluarga dan perusahaan bukan keluarga salah satu kunci adalah adanya partisipasi dan keikutsertaan anggota keluarga dalam

kegiatan manajemen (Kim & Gao., 2013). Yang membedakan bisnis keluarga dan dapat memberikan keunggulan kompetitif pada bisnis merupakan salah satu faktor tidak nyata dari keluarga. Untuk dapat mempertahankan suatu bisnis dan mewariskan bisnis kepada keturunan, ada kemungkinan bahwa kelangsungan bisnis keluarga akan terancam. Bahwa karakter keluarga akan memberikan dampak negative terhadap ukuran dan kinerja perusahaan. Meskipun sumber daya terpenting dalam suatu perusahaan adalah keluarga, tetapi hubungan perusahaan dengan keluarga perlu dijaga. Bahwa bisnis keluarga membutuhkan tata kelola yang baik. Salah satu unsur terpenting dalam suatu tata kelola perusahaan adalah adanya dewan komisaris.

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak bersangkutan dengan dewan komisaris atau pemegang saham pengendali didalam suatu perusahaan. Istilah komisaris independen diatur dalam pasal 120 Undang-Undang Perseroan No.40 Tahun 2007 ayat (1) dalam anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya (1) orang atau lebih komisaris inpeden dan (1) komisaris utama. Dalam pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai komisaris independen dan juga tidak ada aturan secara tegas tentang kedudukan komisaris independen dalam Undang-Undang Perseroan. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 menyebutkan bahwa komposisi dewan komisaris paling sedikit adalah 20% (dua puluh persen) merupakan proporsi anggota dewan komisaris independen yang telah ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Variabel proporsi komisaris independen diukur dengan cara membagi jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris (Haniffa dan Cooke., 2005).

Komisaris independen berperan penting dalam mekanisme pengawasan yang efektif pada aktivitas *tunneling* yang sering terjadi didalam perusahaan (Nugroho, 2020). Oleh karena itu peran komisaris independen sangat penting didalam perusahaan untuk mengawasi kinerja manajemen, sehingga laporan keuangan dalam perusahaan lebih transparan.

Berdasarkan penelitian oleh Ign. Novie Endi Nugroho dengan judul penelitian "Tunneling Pinjaman Berelasi: Studi Empiris Pada Perusahaan Keluarga di Indonesia" bukti empiris pada penelitian ini adanya praktik tunnelling pinjaman berelasi oleh pengendali akhir keluarg yang menggunakan struktur piramida. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik tunnelling pinjaman berelasi yang dilakukan pengendali akhir keluarga disebabkan oleh dua hal, pertama pengguna struktur piramida yang berdampak pada meningkatkan hak kontrol melebihi hak arus kas pengendali akhir keluarga. Kedua, kuatnya kedudukan pengendali akhir keluarga yang berdampak signifikan pada tidak efektifnya fungsi pengawasan yang dijalankan komisaris independen.

Salah satu tata kelola perusahaan yang dilakukan dewan komisaris dan dengan adanya keterkaitan fungsi pengawasan adalah Komite Audit. Komite audit bertugas untuk mengelola dan mengawasi tata kelola audit eksternal atas laporan keuangan dalam perusahaan. Peran komite audit dalam suatu perusahaan adalah mendukung dewan komisaris untuk mengawasi manajemen dalam menyusun laporan keuangan (Triyanti, 2020). Selain itu, komite audit juga berperan dalam menegndalikan manajer dan meningkatkan pendapatan perusahaan dimana manajer perusahaan akan menekan biaya pajaknya.

Dalam POJK55/POJK.O4/2015, bahwa perusahaan publik yang telah terdaftar di BEI harus mempunyai komite audit. Laporan keuangan perusahaan dan bisnis perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan wajib diketahui oleh anggota komite audit.

Komite audit adalah komite independen yang dapat bekerja profesional. Dalam melakukan audit internal agar meningkatnya kualitas laporan keuangan lebih transparan dan efektif dalam bidang keuangan harus di perlukan komite audit yang independen dan memiliki keahlian (Owens-Jackson dkk, 2009; Qinghua dkk, 2007; Salehi dan Shirazai., 2016).

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rosdiyati dengan judul “Efektivitas Komite Audit Memitigasi pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Biaya Audit”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Komite Audit tidak memoderasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap biaya audit (Rosdiyati, 2021).

Dari penelitian diatas disimpulkan bahwa studi relative di Indonesia tentang pengaruh struktur kepemilikan, komisaris independen, dan komite audit terhadap transaksi pihak berelasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI masih sedikit ditemukan. Oleh sebab itu, menjadi suatu hal menarik untuk dijadikan suatu penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut Nugroho (2020) Teori agensi merupakan teori utama yang melandasi hubungan yang terjadi antara *principle* dan manajemen. Teori keagenan merupakan korelasi dimana pemilik perusahaan memperkerjakan seseorang atau manajer untuk membantu mengelola kegiatan perusahaan. Principle dapat disebut dengan investor yaitu seorang manajer yang bertugas untuk menjalankan fungsi manajemen perusahaan. Konsep dari teori agensi yaitu adanya hubungan antara pemilik dan *agent*, dimana pemilik adalah pihak yang memperkerjakan *agent* untuk menjalankan tugas pemilik (Scoot, 2015). Untuk mengurangi asimetri informasi diperlukan suatu media yang dapat menjadi perantara antara *agent* dan *principle*, karena asimetri informasi ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan antara *agent* dan pemilik. Terdapat ketidakseimbangan informasi antara *agent* dan pemilik dikarenakan informasi perusahaan lebih banyak diketahui oleh *agent* dari pada pemilik perusahaan (Irfan, 2002).

Transaksi Pihak Berelasi

Transaksi oihak berelasi merupakan transaksi yang lazim dalam suatu perusahaan. The International Accounting Standard (IAS) 24 menyatakan bahwa pengalihan sumberdaya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak berelasi, dan terlepas apakah harga yang dibebankan disebut sebagai transaksi pihak berelasi. Transaksi berelasi dapat berdampak positif dan negative terhadap kinerja perusahaan (Gordon *et al.*, 2004; Ryngaert dan Thomas, 2007). Dengan mengurangi biaya transaksi untuk mendapatkan akses istimewa dan efisiensi merupakan salah satu keuntungan dari transaksi pihak berelasi (Habib *et al.*, 2017). Masalah dan rentan dengan masalah agensi juga dapat disebabkan dengan adanya transaksi pihak berelasi (Supatmi *et al.*, 2019). Secara teori transaksi berelasi mempunyai sudut pandang. Salah satunya mengenai efficiency-enhancing theory bahwa transaksi berelasi digunakan kelompok bisnis sebagai cara untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik dan dapat mebgurangi biaya transaksi (Al-Gamrh *et al.*, 2017).

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan persentase anatara modal, ekuitas, serta saham yang dimiliki seseorang dalam suatu perusahaan (Edison, 2017). Yang dapat dibedakan kedalam beberapa kategori seperti domestic, asing, manajemen, keluarga dan lain sebagainya. Menurut penelitian dari Whyudin & Fajriah (2017) DAN Utama & Utama (2013).Berkaitan dengan keputusan manajemen perusahaan dalam melakukan transaksi pihak berelasi yang bertabiat tunneling ataupun ekspropriasi hal ini dapat terjadi karena adanya struktur kepemilikan dalam transaksi pihak berelasi. Jika pemegang saham pengendali perusahaan keluarga terkonsentrasi, kemungkinan akan rentan terjadi transaksi pihak berelasi dan terjadinya konflik antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali.

Komisaris Independen

Istilah Komisaris Independen telah diatur dalam pasal 120 UNDANG-Undang Perseroan No.40 Tahun 2007 ayat (1) adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu orang atau lebih komisaris utusandapat diatur dalam anggaran dasar perseroan. Hanya dalam pasal ini tidak dijelaskan lebih tentang komisaris indepeden dan kedudukan komisaris independen dalam Undang-Undang Perseroan. Dalam Undang-Undang Perseroan hanya terdapat ketentuan secara umum mengenai komisaris independen (Nugroho, 2020). Peran penting komisaris independen dalam mekanisme pengawasan yang efektif terhadap aktifitas tunneling yang berpotensi terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi (Nugroho, 2020).

Komite Audit

Komite audit merupakan suatu komite yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam pengawasan agar dapat mengurangi biaya agensi,tingkatan pengendalian internal, dan bisa tingkatkan kualitas informasi dalam suatu perusahaan (Natalia dan Orien, 2016). Setiap perusahaan public yang terdaftar di BEI dalam POJK55/POJK.O4/2015 diharuskan untuk memiliki komite audit. Tujuan dari adanya komite audit adalah mendukung dewan komisaris untuk mengawasi manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Salah satu tugas komite audit berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Nomor:Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 adalah membantu dewan komisaris untuk mengawasi informasi pada laporan keuangan.

Penelitian Terdahulu

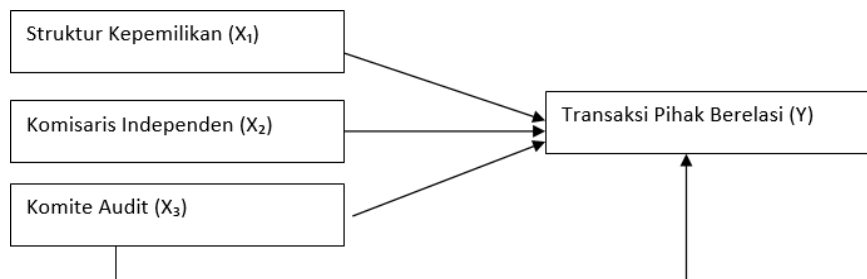
Berdasarkan kajian teori, maka diperoleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Krisvalenta Wukirasih (2022) melakukan penelitian tentang “Pengaruh struktur kepemilikan terhadap transaksi pihak berelasi”. Populasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 170 perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan laporan keuangan tahunan 2018-2020. Pengaruh variabel struktur kepemilikan terhadap transaksi berelasi telah diuji dalam penelitian ini. Hipotesis dalam penelitian ini di uji dengan analisis regresi data panel dan diolah menggunakan EViews 9 dengan hasil bahwa transaksi pihak

- berelasi dalam suatu perusahaan dipengaruhi dengan adanya struktur kepemilikan.
2. Nugroho (2020) melakukan penelitian terhadap “*Tunneling* pinjaman berelasi : studi empiris pada perusahaan keluarga di Indonesia”. Berdasarkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2007-2017 dalam penelitian ini diperoleh jumlah populasi sebanyak 1.340 perusahaan. Dalam penelitian ini menemukan bahwa pengendali akhir keluarga dengan struktur piramida terbukti melakukan praktik tunneling melalui pinjaman berelasi. Peningkatan kepemilikan saham investor institusi asing non-pengendali terbukti menurunkan *tunneling* dan komisaris independen tidak terbukti menurunkan *tunneling* pada perusahaan keluarga dan struktur kepemilikan.
 3. Rosdiyati (2021) melakukan penelitian tentang “Efektivitas komite audit memitigasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap biaya audit”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa biaya audit berpengaruh terhadap transaksi pihak berelasi dan tidak adanya pengaruh efektivitas komite audit tidak memoderasi terhadap pengaruh transaksi pihak berelasi biaya audit.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan pada bagian berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan sebelumnya maka terdapat pengaruh antara variabel-variabel di atas sebagai berikut ini:

1. Diduga struktur kepemilikan pemegang saham pengendali berpengaruh positif dan signifikan terhadap transaksi pihak berelasi.
2. Diduga tidak ada pengaruh signifikan antara komisaris independen perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia terhadap transaksi pihak berelasi.
3. Diduga tidak ada pengaruh signifikan antara komite audit perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia terhadap transaksi pihak berelasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data dalam bentuk angka. Data dalam penelitian ini dikumpulkan berdasarkan sumbernya yang disebut sumber sekunder. Menurut Sugiyono

(2017) sumber sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan secara tidak langsung. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang telah diakses dari beberapa sumber dan situs Bursa Efek Indonesia (Laporan keuangan tahunan tahun 2018-2019). dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak ini adalah 84 (28x3) perusahaan keluarga yang tercatat didalam Bursa Efek Indonesia, kecuali perusahaan perbankan di sektor keuangan periode 2017-2019.

Teknik dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Data perusahaan dalam penelitian didapatkan dari beberapa sumber yaitu Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), (www.idnfinancials.com), (<https://archive.ph/bXntd>), Globe Asia (<http://www.globeasia.com>) dan website sampel perusahaan. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Berganda.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	17,015	3,821		4,453	,000
Struktur Kepemilikan	2,829	1,126	,276	2,513	,014
Komisaris Independen	1,242	1,749	,093	,710	,480
Komite Audit	,711	3,843	,024	,185	,854

Berdasarkan hasil dari perhitungan SPSS di atas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 17,015 + 2,829X_1 + 1,242X_2 + 0,711X_3 + e$$

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa Struktur Kepemilikan (X1) ternyata berpengaruh signifikan terhadap transaksi pihak berelasi (Y). Dapat dilihat dari angka signifikansi diatas kurang dari 0,05 (0,014<0,05). Komisaris Independen (X2) ternyata tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap transaksi berelasi (Y). Hasil penghitungan SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 (0,480>0,05) sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan. Komite Audit (X3) ternyata tidak ada pengaruh signifikan terhadap transaksi pihak berelasi (Y) berdasarkan hasil dari perhitungan SPSS. Tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05 (0,854>0,05) maka menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan.

Tabel 2. Hasil Uji F.

Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	169,390	3	56,463	2,761	,047 ^a
	Residual	1636,201	80	20,453		
	Total	1805,591	83			

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas adalah adanya pengaruh secara simultan antara variabel independen (X1,X2, dan X3) terhadap variabel dependen (Y).Hasil ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,47 < 0,05$.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,306 ^a	,094	,060	4,52245	1,624

Dari hasil uji koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen yang dapat dilihat dari kolom R-Square yaitu 0,094 sedangkan selebihnya yaitu 90,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Transaksi Pihak Berelasi

Berdasarkan hasil dari analisis data, ditemukan bahwa variabel independen struktur kepemilikan pemegang saham pengendali memiliki nilai Sig. yang rendah dari signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu $0,014 < 0,05$. Dari ini diperoleh hasil bahwa hipotesis diterima, yang artinya variabel independen struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen transaksi berelasi.

Bahwa dalam penelitian ini struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap transaksi berelasi. Hasil penelitian dapat diperkuat melalui fakta bahwa kepemilikan perusahaan menentukan adanya kerjasama dengan perusahaan lain. Hal ini diperkuat dengan teori menurut Wahyudin & Fajriah (2017) dan Utama & Utama (2013) bahwa transaksi pihak berelasi khususnya yang betabat tunneling ataupun ekspropriasi akan lebih banyak dilakukan dalam suatu perusahaan dikarenakan bahwa struktur kepemilikan dalam transaksi pihak berelasi berkaitan dengan keputusan manajemen.

2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Transaksi Pihak Berelasi.

Berdasarkan analisis data, komisaris independen memiliki nilai Signifikan yang lebih besar yaitu 0,048 dari tingkat signifikansi yang ditentukan 0,05. Dalam konteks ini, hipotesis mengenai pengaruh komisaris independen terhadap transaksi berelasi ditolak.

Hasil dari penelitian ini bahwa transaksi pihak berelasi tidak dipengaruhi oleh komisaris independen. Hasil penelitian dapat diperkuat bahwa komisaris independen tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan lain. Hasil ini diperkuat dengan teori. Nugroho (2020) Kegiatan efektif yang dilakukan oleh dewan komisaris perusahaan diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan

manajer serta pengendali perusahaan. Komisaris independen ialah salah satu faktor penting dalam mekanisme kontrol internal terkait dengan praktik GCG. Peran dan kedudukan dewan komisaris ini diharapkan mampu mendorong kinerja perusahaan dan mengurangi tindakan oportunistik manajemen ataupun pemegang saham pengendali.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Transaksi Pihak Berelasi.

Hasil dari analisis data, dapat ditemukan bahwa variabel independen komite audit memiliki nilai Signifikan yang lebih dari tingkat signifikansi yang ditentukan, yaitu $0,854 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis mengenai pengaruh komite audit terhadap transaksi pihak berelasi ditolak.

Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa komite audit tidak ada pengaruhnya terhadap transaksi pihak berelasi. Hasil penelitian ini diperkuat bahwa komite audit tidak memiliki wewenang membangun relasi dengan perusahaan lain. Hal ini diperkuat dengan teori Ittne dkk. (2010) menemukan bahwa untuk meningkatkan tingkat pengawasan dan pengendalian internal guna mengurangi resiko dalam perusahaan maka diperlukan komposisi komite audit yang berkualitas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak perlu mementingkan relasi dengan perusahaan lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan bahwa:

1. Struktur kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transaksi pihak berelasi dengan nilai sig. lebih kecil yaitu 0,014 dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan hipotesis pertama, bahwa pengaruh struktur kepemilikan terhadap transaksi pihak berelasi, dapat diterima.
2. Komisaris Independen tidak mempunyai pengaruh signifikan pada transaksi pihak berelasi dengan nilai signifikansi lebih besar yaitu 0,480 dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua, yaitu pengaruh komisaris independen terhadap transaksi berelasi, ditolak.
3. Komite Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transaksi pihak berelasi dengan nilai signifikansi lebih besar 0,854 dari nilai signifikansi yang sudah ditetapkan yaitu 0,05. Ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga, yaitu komite audit terhadap transaksi pihak berelasi, ditolak.
4. Uji Simultan (Uji F) memberikan hasil bahwa nilai signifikansi 0,047 yang dihasilkan uji F lebih kecil dari pada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah fit sehingga layak digunakan sebagai model dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang terdapat pada penelitian tersebut, dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan untuk pertimbangan pada penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penulis berharap peneliti selanjutnya dapat menambah periode waktu penelitian, agar hasil penelitian lebih baik.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor-faktor lain yang dapat memiliki pengaruh terhadap transaksi pihak berelasi yang belum digunakan dalam penelitian ini.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertajam tentang tunneling dan non tunneling

DAFTAR PUSTAKA

- Cerdan, A. L. M. C., & Hernandez, A. J. C. (2013). Size and performance in family managed firms: surviving first generation. *Management Research: The Journal, Santi Yopie/Angellyn Lim* 269 11(1), 13–34.
- Edison, A. (2017). Pengaruh struktur kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility (csr) (studi empiris pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2014). *Jurnal Akuntansi Paradigma*, 11(2), 164–175.
- Edison, A. (2017). Pengaruh struktur kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility (csr) (studi empiris pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2014). *Jurnal Akuntansi Paradigma*, 11(2), 164–175.
- Habib, A., Haris, A., & Jiang, H. (2017). The international journal of accounting political connections and related party transactions : evidence from Indonesia. *International Journal of Accounting*, 52(1), 45–63
- Kim, Y., & Gao, F. Y. (2013). Does family involvement increase business performance? Family-longevity goals' moderating role in Chinese family firms. *Journal of Business Research*, 66(2), 265–274.
- Miralles-Marcelo, J. L., Miralles-Quirós, M. del M., & Lisboa, I. (2014). The impact of family control on firm performance: Evidence from Portugal and Spain. *Journal of Family Business Strategy*, 5(2), 156–168.
- Nugroho, Ign. Novie Endi. 2020. "Tunneling Pinjaman Berelasi: Studi Empiris Pada Perusahaan Keluarga Di Indonesia."
- Rosdiyati, Rodiyati, Fitri Nurjanah, and Indah Kurniawati. 2021. "Efektivitas Komite Audit Memitigasi Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Biaya Audit." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5(2):1086–1094.
- Salehi, M., & Shirazi, M. (2016). Audit committee impact on the quality of financial reporting and disclosure: Evidence from the Tehran Stock Exchange. *Management Research Review*, 39(12), 1639-1662.
- Supatmi, & Widawati, E. (2021). Blockholders ownership dan transaksi pihak berelasi pada industri manufaktur. *Accounting and Financial Review*, 4(1), 107–118.
- Supatmi, Supatmi, and Krisvalenta Wukirasih. 2022. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Transaksi Pihak Berelasi."